

NARSISISME DANA ASPIRASI MASYARAKAT DALAM PENGANGGARAN DAERAH: KAJIAN ETNO-SEMIOTIKA BERBASIS FILSAFAT BARTESIAN

Jenis Sesi Paper: Full paper

Oktavianus Pasoloran¹
Universitas Atma Jaya Makassar

Abstract

This study aims are (1) to understand how the public aspiration funds interpreted as part of the social reality of the local government budgeting, and (2) to understand, analyze, and answer the question of why and how the policy of the public aspiration funds to facilitate narcissism in local government budgeting. This research uses the critical-interpretive paradigm with ethno-semiotics study based on philosophy of Roland Barthes. The results of the research provides an understanding; (1) discourse and the reality of the public aspiration funds has become a model created and produced by actors for the self-interest and politics; (2) the study of semiotics micro level suggests that the meaning of denotation the public aspiration funds by legislatures as one of the policies for the equitable welfare of the community-based constituencies, then the level of connotation the public aspiration funds interpreted as funds deposit box, pork barrel, funds political, aspiration and inspiration by actors, loss of meaning, and no impact. While the macro analysis provide an understanding that the public aspiration funds becomes a myth that seems very "natural" as the fulfillment of the obligations "holy" actor budgets, but behind it there is the motivation selfish, opportunistic, pragmatic, self-interest, political, and imaging and finally describe the ideology of how the dominance of legislatives in budgeting; and (3) narcissism of the public aspiration funds becomes an expression of local government budgeting culture which is absorbed as a form of identity and used as an the impression facility by actors that they care about the community. The public aspiration funds is diffused as a narrative created by an interest, becoming a ritual in local government budgeting and eventually becomes sacred.

Keywords: narcissism, local government budgeting, public aspiration funds, ethno-semiotics

¹ Penulis menyampaikan terima kasih kepada Prof. Eko Ganis Sukoharsono, SE., MCom(Hons), CSRS, Ph.D (Universitas Brawijaya Malang); Dr. Darwis Said, SE., M.SA, Ak dan Dr. Yohanis Rura, SE., M.SA., Ak (Universitas Hasanuddin Makassar) atas arahan beliau dalam penelitian ini.

1. Pendahuluan

Istilah narsistik pertama kali digunakan dalam psikologi oleh Sigmund Freud dengan mengambil tokoh Narcissus dalam mitos Yunani. Narcissus adalah seorang pemuda yang diramalkan akan hidup umur panjang. Namun, Narcissus telah membuat marah para dewa, karena menolak cinta Echo. Saat ia membungkuk untuk minum air pada sebuah kolam, Narcissus melihat bayangannya dan langsung jatuh cinta dengan dirinya sendiri. Setiap kali dia menggenggam gambar itu, gambar itu menghilang. Selama sehari-hari dia duduk di kolam, sekarat, menangis putus asa, dia tidak mampu merangkul cinta akan dirinya sendiri (Chatterjee dan Hambrick, 2006). Itulah sebabnya, kata narsis menggambarkan seseorang yang terlalu mengagumi diri sendiri, percaya diri berlebihan (*over confident*). Narsis sangat egosentris dan senang mencari perhatian.

Pada tingkat sosial, orang yang cenderung narsis merupakan manipulator terampil yang memicu dan memanfaatkan *impuls* narsis pada orang-orang di sekitar mereka. Narsisisme merupakan sikap yang dimiliki individu dalam mempertahankan dan meningkatkan penilaian yang tinggi atas dirinya (Campbell *et al.*, 2004). Chatterjee dan Hambrick (2006) menyimpulkan bahwa narsisisme merupakan suatu hal yang menuntun seseorang dalam mengasumsikan posisi, kekuasaan (*power*), dan pengaruhnya (Kernberg, 1975). Selain itu, narsisisme berkaitan erat dengan harga diri, membantu seseorang dalam kemajuan profesionalnya (Raskin *et al.*, 1991). Pelaku narsis cenderung melakukan penilaian yang tinggi atas dirinya sendiri, baik kecerdasan, kreativitas, kompetensi, dan kemampuan dalam memimpin (John dan Robins, 1994).

Christopher Lasch dalam *the culture of narcissism*, melihat bahwa keberadaan narsisisme ini sangat berbahaya (Lasch, 1979). Narsisisme lebih banyak merayakan budaya permukaan dibandingkan budaya kedalaman. Rasionalitas yang dipakai adalah rasionalitas wajah, popularitas semu dan lain sebagainya. Narsisisme mengingkari budaya kedalaman (substansi). Persepsi tentang “saya” mengalami hiperbola sedemikian rupa dan menggerus habis persepsi tentang “engkau” yang bukan "saya". Maka, persepsi tentang “kita” dan “kekitaan” menjadi kritis dan problematik, untuk tidak mengatakannya menjadi nihil (Rachman, 2009).

Narsisisme Dana Aspirasi Masyarakat dalam Penganggaran Daerah

Pada konteks politik, perilaku politik yang asyik dengan diri sendiri oleh Piliang (2009), menyebutnya sebagai perilaku narsisisme politik (*politics narcissism*). Keberadaan narsisisme politik ini tentu berbahaya, karena lebih banyak menampilkan popularitas “wajah”, ketimbang hal-hal yang bersifat rasional dan substansi. Beberapa fenomena politik dalam pemilihan kepala daerah dan anggota legislatif menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya telah jenuh dengan politik “wajah” yang cenderung narsis. Masyarakat lebih suka bertatap muka ketimbang disuguhi foto-foto besar dan “janji politik”. Pada masa-masa menjelang pemilihan calon legislatif, pemilihan kepala daerah, dan presiden, orasi politik dapat disaksikan dalam berbagai perhelatan untuk menarik simpati calon pemilih. Baliho politik menghiasi sepanjang jalan yang berisi foto raksasa dengan senyum “*narsisis*” dan slogan atau jargon politik serta akronim-akronim yang sering sulit dipahami dari segi tata bahasa. Temanya berhubungan dengan “keberpihakan pada rakyat”. Namun, setelah terpilih ternyata semua itu hanya “jebakan” karena setelah itu mereka semua kembali sibuk dengan *deal* politik sembari membuat rencana politik yang lebih besar lagi.

Dalam tayangan acara salah satu stasiun televisi, *Jakarta Lawers Club* (JLC, 23/2/2013), Menteri Dalam Negeri, Gamawan Faudzi menyatakan kasus korupsi anggaran sampai tahun 2012 telah melibatkan 295 Kepala Daerah, 2.533 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 1.357 Pegawai Negeri Sipil. Modus yang digunakan adalah berhubungan dengan penyalagunaan kebijakan penganggaran daerah. Hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* menunjukkan kuatnya dugaan terjadinya desentralisasi korupsi, dari 267 kasus korupsi, 262 atau 98.12% kasusnya terjadi di daerah selama tiga tahun terakhir sampai tahun 2013 (ICW, 2013). Kebijakan dana aspirasi juga menjadi masalah di beberapa daerah. Salah satu kasus dugaan penyalagunaan dana aspirasi adalah di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, dana aspirasi dianggarkan sebesar Rp 23 miliar untuk pembangunan infrastruktur di daerah pemilihan 35 legislator di kabupaten tersebut dan dititipkan pada beberapa satuan kerja perangkat daerah. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini (Koran Tempo, 2015). Kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2008. Jumlah belanja dana bantuan sosial sebesar Rp151,5 miliar, dimana sekitar Rp149,9 miliar untuk belanja

untuk bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (BPK, 2009).

Pada sektor privat, beberapa peneliti telah meneliti kepribadian CEO dari sudut pandang psikoanalitik menunjukkan beberapa penjelasan dan contoh sindrom kepribadian pada eksekutif (Zaleznik dan Kets de Vries, 1975; Kets de Vries dan Miller, 1985). Peneliti lainnya dengan menggunakan survei psikometrik eksekutif untuk memeriksa dimensi kepribadian tertentu, antara lain; *locus of control* (Miller *et al.*, 1982), kebutuhan untuk berprestasi (Miller dan Droge, 1986), dan toleransi terhadap risiko (Gupta dan Govindarajan, 1984), penelitian tersebut telah mampu menunjukkan hubungan yang signifikan antara dimensi kepribadian eksekutif dan kinerja organisasi. Chatterjee dan Hambrick (2006), mencoba untuk menjelaskan hubungan CEO narsis dan efek pada strategi dan kinerja perusahaan.

Pada sektor publik, penganggaran daerah memiliki dimensi yang luas, yang dapat mendorong pemerintah daerah untuk membentuk narsisisme. Lutus (2007), menyatakan bahwa salah satu pemasok utama narsisisme sosial adalah pemerintah. Narsisisme pemerintah (*government narcissism*) berhubungan dengan bagaimana memanfaatkan masyarakat sesuai apa yang mereka butuhkan dan bahwa pemerintah berada dalam “kekosongan moral”. Kadang-kadang seseorang masuk ke pemerintah dengan ide-ide tentang peran dan keterbatasan, kemudian membuat program dan anggaran berdasarkan narsisisme pribadi yang bertentangan dengan sentimen publik. Namun, kesalahan seperti ini dianggap umum, karena biasanya masyarakat cepat melupakan kesalahan tersebut. Kegagalan narsisisme sosial ditunjukkan oleh ketidakmampuan kebijakan pemerintah melawan naluri dari masyarakat umum. Namun, keberhasilan narsisisme sosial bahwa pemerintah mencapai kekuasaan terbesar ketika masyarakat mengakui dan memperkuat keinginan yang tidak beradab yang dipegang oleh individu. Pemerintah berhasil menarik narsisisme kolektif publik sementara secara pribadi hanya bertindak pada tingkat kepedulian (Lutus, 2007).

Penelitian ini berangkat dari mitos Narcissus. Penggunaan istilah "mitos" merupakan kunci dari suatu narasi yang secara lisan disimpan dan diproses dalam konteks sosial, politik dan agama dalam masyarakat. Menurut Johansson (2012), dalam konteks budaya, mitos Narcissus dan konsep narsisisme dapat disebut sebagai tradisi Narcissus. Narcissus mungkin berada di luar jangkauan,

namun sosok Narcissus telah tertanam dalam ingatan, berbicara, menghasilkan tradisi dan gravitasi makna. Narcissus menjadi lokus untuk dirinya sendiri dalam memori budaya barat. Dilihat dari sudut yang berbeda, tema Narcissus adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan ciri-ciri teks-imanen seperti halnya persoalan identitas, individualitas, subjektivitas dan kedirian yang menunjukkan tradisi Narcissus.

Dalam konteks diskursus post-strukturalis, penelitian ini melihat anggaran daerah sebagai objek sosial yang memiliki implikasi dan relasi politik dan kekuasaan yang melekat di dalamnya. Pada tahap pertama, penelitian ini memilih salah satu wacana kebijakan penganggaran daerah yaitu “dana aspirasi masyarakat” sebagai suatu gagasan tema narsisisme. Dana aspirasi masyarakat adalah sejumlah dana yang diusulkan dan dialokasikan pada APBD sebagai implementasi dari tugas Badan Anggaran yaitu, memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD sebagaimana diatur dalam Pasal 55, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Wacana dana aspirasi masyarakat telah menjadi realitas dalam penganggaran daerah. Program aspirasi masyarakat telah “diciptakan” sebagai bagian dari pemenuhan fungsi dan tanggungjawab anggota DPRD dan “dititipkan” pada program kerja dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pelaksanaan anggaran pemerintah daerah. Proses dan mekanisme penyusunan anggaran sebagai salah satu realitas sosial mestinya menjadi salah satu indikator respon negara dalam memenuhi hak-hak rakyat untuk memperoleh akses yang layak secara sosial ekonomi.

Diskursus tentang “dana aspirasi masyarakat” telah menimbulkan kontradiksi, sehingga pertanyaannya adalah apakah tanda “dana aspirasi masyarakat” yang menunjukkan realitas bahwa sejumlah dana yang digunakan dalam merealisasikan program atau kegiatan pada pemerintah daerah merepresentasikan kebutuhan masyarakat sesungguhnya dan sesuai aspirasi dari masyarakat itu sendiri, ataukah ada makna “lain” yang terkait dengan kepentingan kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Karena fakta menunjukkan bahwa dana-dana yang mengatasmakan kebutuhan masyarakat dan kepentingan sosial menjadi salah satu sumber “banjakan” aktor anggaran.

Penelitian ini menjadi penting dan menarik untuk menelusuri hubungan antara tanda yang diciptakan oleh aktor anggaran sebagai simbol atas fungsi mereka dalam penganggaran daerah dengan realitas yang ditunjukkan dalam anggaran daerah. Menurut Piliang (2012), tingkatan relasi tanda dan realitas yang merefleksikan kualitas informasi dapat digunakan sebagai dasar untuk membenarkan pernyataan. Dalam perpektif semiotika, suatu tanda dapat digunakan untuk merefleksikan kebenaran, kepalsuan, bahkan kedustaan. Semakin tidak simetris relasi tanda dan realitas, maka semakin besar kemungkinan tanda merefleksikan kepalsuan, bahkan kedustaan.

Pada tahap selanjutnya, penelitian ini menggunakan pelintasan sistem tanda “narcissus” sebagai teks referensi untuk menggambarkan karakteristik kepribadian tertentu yaitu “narsisisme”. Sebagai satu proses linguistik dan proses diskursif, Kristeva menyatakan “pelintasan dari satu sistem tanda ke sistem tanda lainnya” sebagai intertekstualitas (Piliang, 2012). Bagi Kristeva, sebuah teks (dalam pengetahuan umum) bukanlah sebuah fenomena kebudayaan yang berdiri sendiri dan bersifat otonom, dalam pengertian, bahwa teks tersebut eksis berdasarkan relasi-relasi atau kriteri-kriteria yang internal pada dirinya sendiri, tanpa dilatarbelakangi oleh sesuatu yang eksternal, melainkan sebuah permainan mozaik dari kutipan-kutipan, dari teks-teks yang mendahuluinya.

The Picture dari Dorian Gray (1891) dalam Johansson (2012), membuka perspektif modernitas spesifik sosok Narcissus dan mengeksplorasi hubungan *mirroring* berkaitan dengan suatu persona sosial serta alam bawah sadar. Kekuatan referensi intertekstual diambil sebagai kriteria yang diperlukan untuk menunjukkan fakta yang dianggap teks-teks yang secara eksplisit merujuk pada tema Narcissus. Dengan kata lain, sekarang fenomena narsisisme diberi penjelasan rasional sehingga mitos telah habis dan kehilangan nilai penjelasannya (Johansson, 2012). Pentingnya tema cermin dalam simbolisme menurut Michaud (1947), dalam Johansson (2012), tidak hanya sebagai gambar, tapi generator atau katalis. Selanjutnya, Michaud berpendapat bahwa "Narcissus adalah mitos manusia modern". Goth (1966) dalam Johansson (2012), menemukan bahwa tema Narcissus dapat mengekspresikan kondisi manusia sebagai lawan makhluk lain, sebagai makhluk yang tidak pernah bisa bersatu dengan dirinya sendiri.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, beberapa pertanyaan yang ingin dijawab melalui penelitian ini. Pertama adalah bagaimana dana aspirasi masyarakat sebagai bagian dari realitas sosial anggaran

daerah dimaknai oleh aktor anggaran daerah dan masyarakat. Kedua adalah bagaimana dana aspirasi masyarakat dapat memfasilitasi narsisisme dalam penganggaran daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana aktor anggaran daerah dan masyarakat memaknai dana aspirasi masyarakat dalam penganggaran daerah dan untuk memahami, menganalisis, dan menjawab mengapa dan bagaimana narsisisme dalam penganggaran daerah.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 *In Memory of Narcissus*

Kisah Narcissus adalah salah satu mitos Yunani kuno. Narcissus adalah seorang putra dari dewa sungai Cephisus dan ibunya adalah seorang bidadari bernama Liriope. Ketika Narcissus masih kecil, seorang peramal, Tiresias berkata kepada kedua orang tuanya bahwa anak mereka akan berumur panjang apabila tidak melihat dirinya sendiri. Narcissus adalah seorang pria tampan yang pada usia 16 tahun dipuja oleh banyak wanita dan pria. Akibat ketampanannya banyak yang jatuh cinta kepada Narcissus. Salah satunya bidadari bernama Echo yang jatuh cinta kepadanya. Namun, tidak seorang pun yang dibalas cintanya oleh Narcissus, demikian pula Echo. Akhirnya, Echo berlari dan bersembunyi dan hidup di gua-gua karena malu, kesepian, merana dan patah hati. Echo hidup dalam kesedihan dan kesendirian, dia tidak mampu mencintai siapapun kecuali orang yang menolak cintanya.

Dewi Nemmesis mendengar doa Echo yang cintanya ditolak Narcissus. Nemesis mengutuk Narcissus supaya jatuh cinta kepada bayangannya sendiri. Kutukan tersebut menjadi kenyataan ketika Narcissus melihat bayangan dirinya dalam air pada sebuah kolam. Dia tak henti-hentinya mengagumi sosok yang terlihat dari pantulan air di kolam itu. Narcissus telah mengambil hidupnya sendiri dan tidak mampu untuk memiliki cintanya, seperti yang diramalkan oleh Tiresias. Seperti halnya Echo, Narcissus mencintai apa yang dia tidak bisa miliki. Narcissus telah terperangkap dalam *self-love* dan tidak dapat membedakan antara realitas dan ilusi. Sebaliknya, Narcissus menggunakan segala cara untuk memiliki, memasukkan dan merefleksikan cintanya ke dalam dirinya sendiri. Ketika upaya itu gagal, akhirnya Narcissus bunuh diri dan berubah menjadi

bunga berwarna kuning cerah yang disebut *narcissus*, dan dikenal juga dengan nama *yellow daffodil* (Dunbar, 1985).

2.2 Teks dan Intertekstualitas: Proses Mereproduksi Makna

Menurut Barthes (1981), bahwa setiap teks adalah sebuah anyaman baru dari kutipan-kutipan lama. Konsep intertekstualitas menyatakan bahwa teks apa pun tidak bisa disederhanakan hanya sebagai masalah sumber atau pengaruh. Intertekstualitas adalah medan umum dari formula-formula anonim yang asal-usulnya boleh dikatakan tidak bisa dilacak lagi yang dikutip secara otomatis melalui kesadaran dan di manfaatkan tanpa dimasalahkan. Teks bukan merupakan objek yang tetap, melainkan dinamis. Karena dinamis, teks baru hidup di dalam interaksi dan berada di tengah-tengah interaksi tersebut. Pengarang bukan lagi penentu makna dan kebenaran.

Teks adalah produk tulisan yang performatif dan menghasilkan sesuatu, aktifitas pembaca memperbanyak dirinya sendiri tanpa batas. Teks membuat celah pada tanda sehingga muncul beragam arti. Oleh karena teks bukan objek yang stabil, maka teks tidak menjadi suatu pokok yang padat dalam metabahasa. Segala sesuatu yang melingkungi kita (kebudayaan, politik, dan sebagainya) dapat dianggap sebagai sebuah “teks”. Teks yang berbahasa ditempatkan di tengah-tengah teks-teks lain tersebut. Proses terjadinya sebuah teks diumpamakan dengan proses tenunan. Setiap arti diturunkan ke dalam suatu pola arti lain (Hartoko & Rahmanto, 1986).

Barthes mengingatkan bahwa dari perspektif intertekstualitas, peristiwa yang telah membuat sebuah teks adalah anonim, tidak dapat dilacak, dan akhirnya tidak selalu dapat dibaca. Kristeva juga mendefinisikan intertekstualitas sebagai kesimpulan pengetahuan yang membuat teks memiliki makna: ketika pembaca berpikir mengenai sebuah teks sebagai sesuatu yang bebas dari teks-teks lain yang diserap dan ditransformasikan (Culler, 1981). Intertekstualitas didasarkan pada wawasan bahwa tidak ada teks yang berada dalam ruang hampa, bahwa teks-teks dibuat dari teks.

2.3 Intertekstualitas: Dari *Narcissus* ke *Narsisisme*

Meskipun mitos *Narcissus* adalah cerita singkat dari mitologi Yunani, namun para ilmuwan telah lama terpesona oleh konsep narsisisme dalam berbagai disiplin ilmu. Topik narsisisme telah menarik

perhatian banyak penulis buku, artikel, dan diskusi dalam berbagai simposium. Seperti kisah dalam mitologi Yunani, Narcissus jatuh cinta dengan bayangannya sendiri dan bahwa ia tidak bisa keluar dari illusi dan mati sebagai hasilnya. Kristeva menafsirkan bahwa Narcissus adalah figurasi kebangkitan dari interioritas spekulatif dalam pemikiran Barat. Sejarah subjektivitas modern, selama periode ini, tercermin dalam tema Narcissus. Subjek modern didirikan pada beberapa tema budaya dalam tradisi Barat sangat terkait dengan refleksi dari mitos Narcissus.

Cerita tradisional Narcissus cocok untuk sebuah figurasi simbol dari subjek modern. Menurut Johansson (2012), walaupun Narcissus bukan merupakan referensi mitologi yang diambil sendiri oleh Freud, namun mitos tersebut telah menjadi wacana psikologis dan Freud berhasil membawa gagasan narsisisme tersebut ke dalam konsep psikoanalitik. Selanjutnya Johansson menjelaskan tentang pentingnya melihat kembali hubungan antara Narcissus dan narsisme, bahwa narsisisme bukan Narcissus. Walaupun dengan alasan tata bahasa sederhana, terutama karena istilah "narsisis" perlu mengasumsikan adanya kesetaraan antara Narcissus dan narsisisme. Untuk mencapai pemahaman yang tepat tentang hubungan intertekstualitas antara Narcissus dan narsisme, maka harus dimulai dengan mengakui perbedaan antara keduanya. Narcissus adalah seorang tokoh mitologis sedangkan narsisme (bila sepenuhnya dikembangkan) adalah sebuah konsep *metapsychological*. Bagaimanapun, keduanya berhubungan erat dan hubungan ini menjadi gambaran penelitian ini.

Menurut Johansson (2012), tema Narcissus menyediakan lokus intertekstual untuk pertumbuhan dari makna yang ditimbulkannya dan narsisisme dirancang untuk mengontrol makna tersebut. Narcissus, narsisis, dan narsisisme masing-masing membentuk mitologi, pengamatan psikologis dan teori psikologi. Konsep narsisisme dan narsisis adalah karakteristik umum dari Narcissus dan untuk pengembangan konsep narsisme adalah dengan menciptakan hubungan antara tema Narcissus dan fenomena psikologis tertentu. Narsisme, pada saat ini konotasinya tersebar dalam arah yang dipandu oleh tradisi Narcissus.

2.4 Narsisisme dalam Penganggaran Daerah: Perspektif Politik Anggaran

Penganggaran daerah sebagai hasil konstruksi sosial menunjukkan aktivitas dan perilaku pemerintah daerah yang merefleksikan nilai dan tujuan sosial. Menurut Wildavsky (2001) bahwa anggaran tidak

dapat dipisahkan dari nilai yang dianut masyarakatnya. Oleh sebab itu, menurutnya, perlu adanya pandangan pragmatis dan praktis di dalam melihat anggaran untuk mempelajari ideologi sosial dan politik yang dianut oleh suatu masyarakat atau pemerintah. Sejalan dengan pandangan tersebut, King (2000) berpendapat bahwa anggaran tidak dapat dimengerti tanpa mengetahui “*context*”, karena itu, Koven (1999) dalam studinya tidak memfokuskan pada angka-angka dalam proses anggaran, akan tetapi ia melihat beberapa pemicu seperti politik dan kekuasaan. Menurut Syarifuddin (2011), anggaran daerah adalah wajah dan hati dari para pelaku pengambilan kebijakan. ”Wajah”, karena anggaran adalah sesuatu yang bisa dibaca oleh siapa saja, dan tidak dapat disembunyikan. Sementara ”hati” adalah suatu proses pergolakan bak sebuah drama, karena angka-angka yang terdapat dalam sebuah naskah anggaran hanya merupakan suatu realitas fisik, sementara realitas non fisiknya seperti semangat (*spirit*), emosional (*emotional*) dan jiwa (*soul*) apalagi aspek spiritual selama ini hanya diketahui oleh para pelaku kebijakan tersebut.

Ketika penganggaran daerah tidak dapat menunjukkan bagaimana pengelolaan sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat, para politisi, birokrat, dan legislatif akan berupaya untuk memengaruhi persepsi masyarakat dengan membentuk citra seolah-olah mereka telah menjalankan amanah yang dipercayakan oleh *vouters* (masyarakat). Akuntansi anggaran, dengan demikian memiliki potensi untuk menonjolkan “*hall of mirror*”.

Menurut Norton dan Elson (2002), politik anggaran daerah harus dikendalikan oleh tujuan yang akan dicapai. Dengan kata lain harus ada keterkaitan antara keuangan daerah dengan arah kebijakan sebagaimana tertuang rencana pemerintah daerah. Politik anggaran harus menjadi alat mencapai tujuan pembangunan daerah. Konsekuensi dari politik anggaran ini adalah pemerintah didorong melakukan perubahan secara mendasar di level birokrasi. Seluruh satuan kerja perangkat daerah perlu didorong untuk meningkatkan penerimaan dan melakukan efisiensi dan efektivitas pengeluaran di daerah. Anggaran daerah dengan demikian dapat memiliki berbagai efek sosial, politik atau berkontribusi terhadap perubahan dalam proses ekonomi dan struktur pemerintahan daerah.

Menurut Kets de Vries (2004), dosis narsisisme ekstrim merupakan prasyarat bagi siapa saja yang berharap untuk naik ke puncak organisasi. Dalam kompetisi yang tinggi fitur kepribadian narsistik yang kuat lebih bersedia untuk melakukan proses sulit untuk mencapai posisi kekuasaan.

Pech dan Slade (2007), berpendapat bahwa narsisis “menginginkan posisi manajerial yang lebih tinggi” untuk memenuhi kepuasan memperoleh kekuasaan melalui legitimasi sesuai tuntutan ritual organisasi. Narsisisme sering disebut sebagai salah satu dimensi kepribadian “*machiavellianism triad*” (Paulhus dan Williams, 2002) dengan kecenderungan manipulatif, pembohong, oportunistik, namun mampu menarik perhatian, karismatik dan berpura-pura emosi. Narsisisme politik menurut Piliang (2009), adalah kecenderungan “pemujaan diri” berlebihan para elite politik, yang membangun citra diri meski itu bukan realitas diri sebenarnya: “dekat dengan petani”, “pembela wong cilik”, “akrab dengan pedagang pasar”, “pemimpin bertakwa”, “penjaga kesatuan bangsa”, “pemberantas praktik korupsi”, atau “pembela nurani bangsa”. Narsisisme politik adalah cermin “artifisialisme politik” (*political artificialism*), melalui konstruksi citra diri yang sebaik, secerdas, seintelekt, sesempurna, dan seideal mungkin, tanpa menghiraukan pandangan umum terhadap realitas diri sebenarnya.

Kuatnya virus politik dalam konteks birokrasi yang disuntik ke tubuh birokrasi membuat birokrasi terlihat sangat politis transaksional dan retorik. Padahal birokrasi telah lama dinisbat sebagai *the cradle of civilization* (tempat lahir peradaban) manusia dengan berorientasi pada upaya mewujudkan keadilan, kejujuran, kecermatan serta keefektifan mengurus dan melayani kepentingan publik melalui tangan-tangan birokrat yang andal (Meyer, 2000). Birokrasi yang berperadaban tentu selalu menyelami dan menjangkau setiap aspirasi publik dengan menjadikan rakyat sebagai basis legitimasi dan operasionalnya.

3. Metode Penelitian

3.1 Semiotika Roland Barthes sebagai Alat Analisis

Menurut Hoed (2008) dalam wawasan semiotika post-strukturalis, Barthes tidak berbicara tentang “menunda” hubungan penanda-petanda yang kemudian disebut dekonstruksi oleh Derrida. Barthes lebih mengarah pada “mengembangkan (*amplification*)” hubungan itu ke arah “ekspresi” (E) dan “isi” (*contenu*, C). Barthes, bicara tentang mitos melalui proses konotasi (sebagai perluasan model penanda-petanda de Saussure) yang hidup dalam masyarakat budaya tertentu (bukan secara individu). Menurut Piliang (2009), ketika sebuah teks dilihat dalam dimensi sosialnya, maka analisis

semiotika harus dikaitkan dengan konteks relasi sosiopolitik dan institusi dibalik teks. Semiotika yang dikembangkan oleh Barthes, menghubungkan sebuah teks dengan struktur makro (mitos, ideologi) sebuah masyarakat yang selanjutnya oleh Piliang (2009) disebut etno-semiotika. Sehingga, tanda dan bahasa tidak lagi dikaji pada tingkat sintaktik semata akan tetapi juga tingkat semantik dan pragmatik.

Pemikiran Barthes tentang mitos masih melanjutkan apa yang diandaikan Saussure tentang hubungan bahasa dan makna atau antara penanda dan petanda. Mitos bermain pada wilayah pertandaan tingkat kedua atau pada tingkat konotasi bahasa. Jika Saussure mengatakan bahwa makna adalah apa yang didenotasikan oleh tanda, Barthes menambah pengertian ini menjadi makna pada tingkat konotasi. Konotasi bagi Barthes justru mendenotasikan sesuatu hal yang ia nyatakan sebagai mitos, dan mitos ini mempunyai konotasi terhadap ideologi tertentu. Tingkatan tanda dan makna Barthes dapat digambarkan sebagai berikut:

Tanda → Denotasi → Konotasi (Kode) → Mitos

Sumber: Piliang (2012)

Penganggaran daerah sebagai suatu proses yang menggunakan pendekatan transaksi ekonomi dan sistem informasi, kerangka kerja dan metode merupakan bagian dari aplikasi semiotika. Menurut pandangan semiotika, bila seluruh praktik sosial dapat dianggap sebagai fenomena bahasa, maka semuanya juga dapat dianggap sebagai tanda (Piliang, 2012). Penganggaran daerah sebagai konstruksi sosial, ekonomi dan sistem informasi dengan demikian dapat diamati dalam kerangka semiotika untuk menunjukkan bagaimana perubahan atau desain organisasi dalam hal penggunaan model dan metafora. Dalam konteks ini, ketika anggaran daerah dipandang sebagai produk kebudayaan, maka menjadi penting untuk melihat bagaimana aktor anggaran daerah memproduksi dan mempertukarkan makna melalui praktik bahasanya.

3.2 Etno-Semiotika: Sebuah Gagasan Metodologi Alternatif

Semiotika sering dikritik bergerak terlalu jauh antara teks dan struktur sosial, dan mengabaikan fakta bahwa ada hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara teks dan masyarakat pembaca (penonton, pemirsa, pengguna). Piliang (2003), menyatakan bahwa ketika sebuah teks dilihat dalam

dimensi sosialnya, maka di sini diperlukan dua tingkat analisis, yaitu: pertama, analisis makro, yang berkaitan dengan konteks relasi sosiopolitik dan institusi di balik teks.

Semiotika yang dikembangkan oleh Barthes, misalnya, menghubungkan sebuah teks dengan struktur makro (mitos, ideologi) sebuah masyarakat. Kedua, analisis mikro, menyangkut pengalaman langsung dalam kehidupan sehari-hari masyarakat berhadapan dengan teks. Etnosemiotika adalah satu metode yang menghubungkan pembacaan teks dengan kehidupan sehari-hari yang bersifat mikro tersebut. Analisis mikro menuntun peneliti untuk mengamati fenomena berdasarkan makna yang mendasari tindakan sosial dan mementingkan native point of view. Oleh sebab itu, ia mengkaji tanda dan bahasa tidak lagi pada tingkat sintaktik semata akan tetapi juga tingkat semantik dan pragmatik. Pada tingkat makro pendekatan interpretif mengalami transformasi kearah pendekatan kritis.

3.3 Situs Sosial Penelitian

Untuk mengeksplorasi berbagai makna narsisisme dalam penganggaran daerah, penelitian ini menggunakan penganggaran pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan situs penelitian, khususnya yang terkait dengan kebijakan dana aspirasi masyarakat. Dana aspirasi masyarakat tidak sekedar wacana yang diusulkan oleh anggota dewan baik di tingkat pusat maupun daerah, namun telah menjadi realitas dan telah banyak dikritik karena berbagai penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaannya. Dana aspirasi masyarakat menjadi “tanda” keberpihakan anggaran daerah terhadap masyarakat, namun dalam realitasnya dana aspirasi masyarakat tidak lebih sebagai kebijakan populis untuk mendapatkan kepentingan tertentu dari aktor penganggaran daerah.

3.4 Penetapan Informan

Informan dalam penelitian adalah sebanyak lima belas orang. Pemilihan para informan tersebut dilakukan secara sengaja, berdasarkan kriteria yang dijelaskan oleh Bungin (2003:54), bahwa informan merupakan individu yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran penelitian. Informan dalam penelitian ini antara lain: Pemerintah Daerah, Auditor Pemerintah, Anggota DPRD, LSM KOPEL Sulawesi Selatan, LSM Anti Corruption Watch Sulawesi, Rekanan Pekerjaan Proyek Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

4. Analisis Mikro: Sudut Pandang Informan

4.1 Makna Denotasi Dana Aspirasi Masyarakat: Sudut Pandang Anggota DPRD

Legislatif selalu berada dibalik argumentasi bahwa dana aspirasi masyarakat itu adalah untuk pemerataan “keadilan” dan kesejahteraan masyarakat “daerah pemilihan” dan pengelolaan dananya bukan mereka, tetapi oleh pemerintah daerah. Seperti yang dikemukakan oleh, H.Lufri, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan:

“kalau di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan itu bukan dana aspirasi, melainkan program yang diaspirasikan melalui para anggota DPRD. Yang mana program itu diperoleh dari hasil kunjungan kembali ke daerah pemilihan (dapil). Jadi, aspirasi, lanjutnya, sesungguhnya bukanlah aspirasi dewan, tetapi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan. Dan merupakan suatu keharusan serta tanggung jawab bagi anggota DPRD sebagai representasi dari masyarakat untuk mewujudkan serta merealisasikan dalam bentuk pembangunan. Aspirasi masyarakat adalah seluruh kebutuhan pembangunan kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. “Nah, kalau kita bicara angka, maka jumlah aspirasi masyarakat adalah sebesar APBD tahun anggaran berjalan”.

Sudut pandang anggota dewan baik DPR maupun DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa:

- a. Dana aspirasi masyarakat adalah salah satu bentuk kepentingan politik.
- b. Dana aspirasi masyarakat menjadi bagian dari mekanisme dan kebijakan penganggaran.
- c. Dana aspirasi masyarakat bertujuan untuk pemerataan berdasarkan daerah pemilihan (dapil) anggota dewan. Alasannya adalah bahwa dana-dana untuk pembangunan di daerah diperoleh melalui “lobby” yang kuat dan harus “dibeli” untuk mempengaruhi alokasi anggaran.
- d. Dana aspirasi masyarakat adalah program yang diaspirasikan anggota dewan sebagai hasil penjangkangan aspirasi atau reses.
- e. Dana aspirasi masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban anggota dewan sebagai representasi dari masyarakat.
- f. Dana aspirasi masyarakat adalah seluruh kebutuhan pembangunan kemasyarakatan yang secara nominal direpresentasikan dalam APBD.

Anggota DPRD, seperti pendapat diatas menyadari bahwa sebenarnya yang dipersoalkan selama ini memang pada aspek dananya, karena usulan program yang sesuai dengan aspirasi masyarakat

memang menjadi tugas DPRD bersama-sama dengan perangkat daerah untuk merumuskan program kegiatan yang sesuai kebutuhan masyarakat. Penggunaan istilah “dana” pada aspirasi masyarakat, menunjukkan jumlah nominal yang melekat “dianggarkan” pada program atau kegiatan yang menjadi usulan anggota DPRD sebagai hasil “penjaringan aspirasi” pada saat melakukan reses, sehingga melekat “tanggung jawab” pada anggota DPRD untuk “mengawalnya”. Kosekuensinya bahwa dana yang terkait dengan program itu “dikendalikan” oleh mereka. Sedangkan “masyarakat” yang melekat pada dana aspirasi menunjukkan sasaran dari dana aspirasi. Penambahan istilah “masyarakat” menunjukkan bahwa tujuan dana ini untuk kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan mereka, walaupun yang dimaksud dengan masyarakat adalah “daerah pemilihan” yang merupakan bentuk sempit dari representasi “masyarakat”.

4.2 Makna Konotasi Dana Aspirasi Masyarakat

1. Dana Titipan “Locker”: Sudut Pandang Birokrat

Dana aspirasi masyarakat merupakan usulan dari legislatif atau DPRD yang kemudian dimasukkan dalam program dan anggaran SKPD dan menjadi bagian dari mekanisme penganggaran daerah. Hasil pemaknaan oleh birokrat atau pemerintah daerah berhadapan dengan Dana Aspirasi Masyarakat menunjukkan bahwa:

- a. Dana aspirasi masyarakat sesungguhnya adalah rekayasa anggaran daerah dimana program dan kegiatan masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang diusulkan melalui Program Kerja dan Anggaran (PKA), kemudian “diklaim” sebagai bagian dari program aspirasi masyarakat yang diusulkan oleh anggota DPRD.
- b. Dana aspirasi masyarakat diekspresikan sebagai “dana titipan”. Dana titipan berkonotasi sebagai dana yang dimiliki dan dikendalikan oleh “penitip”. Program kerja dan anggaran di SKPD dimaknai sebagai “locker” atau wadah dimana dana aspirasi itu akan ditempatkan. Tentu bisa dipahami bahwa “penitip” dan yang “dititipi” masing-masing dapat saja mengambil bagian yang “dialokasikan” sebagai “dana locker” DAM sebagai “titipan anggota dewan”

- c. Dana aspirasi masyarakat sulit dikelola karena jumlah dana tersebut sudah tidak “utuh” sesuai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) karena telah dialokasikan kepada anggota DPRD sebagai “penitip” dan alokasi lainnya pada pihak dimana dana aspirasi masyarakat “dititip”. Hal ini menyebabkan dana aspirasi masyarakat sulit dipertanggungjawabkan dan potensi untuk direayasa dan dimanupulasi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Pada sisi legislatif fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan dana aspirasi masyarakat yang seharusnya dilakukan oleh anggota DPRD menjadi tidak maksimal.

2. Potensi Penyimpangan: Sudut Pandang Auditor

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman bagaimana auditor fungsional pemerintah daerah memaknai dana aspirasi masyarakat sebagai berikut:

- a. Dana aspirasi masyarakat menjadi salah masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government governance*). Pengelolaan dan pertanggungjawaban program atau kegiatan yang terkait dengan dana aspirasi masyarakat dapat mendistorsi pencapaian prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- b. Dana aspirasi atau dana-dana lain seperti bantuan sosial, hibah merupakan area yang “*sexy*” dalam pemeriksaan dan berpotensi menjadi temuan dalam audit kepatuhan. Salah bukti hasil audit kepatuhan yang saat ini dalam proses persidangan adalah dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2008.
- c. Dana aspirasi masyarakat sifatnya *spending*/belanja langsung atau belanja barang dan jasa yang sering menjadi masalah dalam pertanggungjawaban anggaran daerah. Kinerja anggaran daerah masih terkait dengan output yaitu sejauhmana serapan anggaran daerah dan belum mampu mengukur *outcome* dari pelaksanaan anggaran daerah.

3. Inspirasi dan Konspirasi Aktor Anggaran Daerah: Sudut Pandang Lembaga Swadaya Masyarakat

Hasil wawancara dengan informan dari LSM menunjukkan bahwa dana aspirasi masyarakat dimaknai sebagai:

- a. Dana aspirasi masyarakat sebagai bagian dari konspirasi kepentingan aktor yang terlibat dalam pengelolaan dana aspirasi masyarakat. Dana aspirasi masyarakat dimaknai sebagai

Narsisisme Dana Aspirasi Masyarakat dalam Penganggaran Daerah

dana “inspirasi para aktor penganggaran daerah” pengelola dana tersebut yang ber-“isi” (*contenu*) alokasi-alokasi dana yang dinikmati “bersama”. Konspirasi dalam pengelolaan dana aspirasi masyarakat telah menjadi bagian dari budaya dari “politik anggaran” yang semakin sulit ditelusuri pada dampaknya terhadap masyarakat sesuai tujuan “suci” program atau dana aspirasi tersebut. Dana aspirasi masyarakat dalam pelaksanaannya dianggap sebagai “*stomach gas*” (prakteknya ada, sulit dibuktikan)

- b. Dana aspirasi masyarakat mengacaukan sistem perencanaan penganggaran dan perimbangan keuangan, tidak sesuai dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, bertentangan dengan azas dana perimbangan dan menyebabkan anggaran tidak efisien.
- c. Bagi LSM, dana aspirasi masyarakat menyuburkan calo anggaran dan memperbesar jurang kemiskinan antar daerah (alokasi berdasarkan daerah pemilihan). Dana aspirasi masyarakat tidak memiliki landasan hukum dan melanggengkan status *quo* terutama bahwa dana aspirasi masyarakat tidak lebih sebagai dana taktis *pork barrel* untuk tujuan politik yaitu menarik simpati pemilih. Keterlibatan anggota DPRD dalam alokasi dana aspirasi masyarakat justru dapat mengakibatkan masalah hukum sebagai bagian dari korupsi anggaran daerah.

4. Kehilangan Makna dan Tidak Berdampak “Efek Cukur Kumis”: Sudut Pandang Masyarakat

Pemaknaan dana aspirasi masyarakat oleh masyarakat adalah:

- a. Dana aspirasi masyarakat kehilangan makna. Masyarakat mengharapkan para aktor anggaran daerah tidak hanya menggunakan istilahnya tetapi tidak sesuai dengan realitasnya.
- b. Dana aspirasi masyarakat dimaknai sebagai “*mustche shear effect*”, sebagai fenomena “cukur kumis”, yang dampaknya hanya kelihatan ketika dicukur tetapi setelah itu akan muncul lagi. Hal ini berarti masyarakat sesungguhnya menginginkan perubahan yang lebih fundamental dan strategis, seperti mendorong perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Masyarakat lebih mementingkan dampak dari setiap dana yang ditujukan untuk masyarakat.
- c. Dana aspirasi masyarakat sebagai komoditas politik yang hanya dinikmati oleh oleh aktor anggaran daerah atau pihak-pihak tertentu yang justru tidak perlu bantuan. Dana aspirasi

masyarakat justru melemahkan fungsi pengawasan DPRD dan tanggungjawab anggota DPRD sebagai “wakil rakyat” dan bukan hanya rakyat dalam konteks daerah pemilihan.

4.4 Mitos Dana Aspirasi Masyarakat: Analisis Tingkat Makro

Dana aspirasi masyarakat telah menjadi bagian dari politik penganggaran daerah yang berusaha dipertahankan, walaupun kemudian mendapatkan kritikan dari masyarakat. Menurut Sala (2010), agar mitos politik bertahan hidup, ia harus mampu beradaptasi melalui masa-masa perubahan. Mitos politik perlu pendongeng yang memiliki kapasitas untuk membuat dan menjaganya menjadi relevan; jadi bagaimana mitos terus hidup, dari mana mereka berasal, merupakan cara penting untuk memahami bagaimana legitimasi dihasilkan (Bell, 2003). Mitos perlu pelaku sosial untuk membawa mereka hidup dan memastikan bahwa mereka dapat terus menceritakan kisah yang beresonansi. Tetapi jika masyarakat sipil memilih untuk menghasilkan dan mempromosikan mitos sendiri, maka legitimasi kekuasaan politik mungkin akan dipertanyakan. Hal ini merupakan ciri dari periode modern dan negara modern; bahwa negara tidak hanya memiliki monopoli kekerasan, juga memonopoli narasi dari apa yang merupakan otoritas politik yang sah, dari mana asalnya dan siapa yang berhak untuk menikmati barang kolektif.

Dalam kaitannya dengan politik anggaran daerah, dana aspirasi masyarakat telah “diciptakan” oleh para aktor anggaran untuk mengekspresikan identitas mereka sebagai “wakil rakyat” dalam memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakili dan mempercayakan pengelolaannya kepada birokrat untuk “melayani” kepentingan masyarakat. Berdasarkan pembacaan semiotika pada tingkat mikro, para informan menyatakan bahwa dana aspirasi semata-mata telah menjadi alat “*impression*” para aktor anggaran untuk meningkatkan citra politik mereka. Dana aspirasi masyarakat telah beroperasi pada wilayah “mitos”. Untuk menelusuri bagaimana dana aspirasi masyarakat “bermutasi” menjadi mitos, dapat menggunakan pendekatan evolusi mitos seperti yang dikemukakan oleh Bouchard (2007) yang melibatkan tiga tahap, yaitu; difusi, ritual dan sakral.

1. Tahap Difusi

Pada tahap pertama, yaitu tahap difusi, menunjukkan berbagai pelaku mencari beberapa keuntungan melalui difusi narasi tertentu, misalnya melalui promosi atau kampanye politis. Dalam

perjalanannya dana aspirasi masyarakat telah menjadi alasan “narasi” politik di daerah, sebagai upaya untuk menjembatani hasil reses anggota dewan untuk membawa aspirasi masyarakat dalam struktur penganggaran daerah dan menjadi bagian dari mekanisme penting penganggaran daerah. Pada tahap ini dana aspirasi masyarakat telah menunjukkan eksistensinya. Dengan demikian dana aspirasi berdifusi sebagai alat politik. Kondisi ini menurut Piliang (2009), bahwa politik telah menjadi “politik pencitraan (*the politics of image*)” yang merayakan citra ketimbang kompetensi politik. Dalam simulakra politik, segala potensi tanda, citra, dan tontonan; segala kekuatan bahasa (*language power*); kekuatan simbol (*symbolic power*) dikerahkan, dalam rangka membangun citra, membentuk opini publik, mengubah persepsi, mengendalikan kesadaran massa (*mass consciousness*), dan mengarahkan preferensi politik meski semuanya tak lebih dari iring-iringan simulakra belaka.

2. Tahap Ritual

Pada tahap kedua, mitos menjadi ritual yang masuk ke dalam wacana dan praktik politik melalui penentuan strategi yang harus dilakukan berdasarkan narasi. Siklus politik anggaran daerah menunjukkan bagaimana mekanisme penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui serangkaian sistem perencanaan strategis yang dimulai dari proses yang paling “abstrak” sampai proses operasionalisasi yang paling “realistis” yang pada akhirnya menghasilkan rumusan RAPBD. Dana aspirasi masyarakat telah menjadi bagian dari politik anggaran daerah melalui pola perilaku informal antara DPRD melalui alat kelengkapannya yaitu komisi-komisi dengan pemerintah daerah melalui SKPD. Pada tahap inilah dana aspirasi masyarakat memperoleh tempat yang layak, menjadi bagian dari ritual penganggaran daerah. Menurut Olsen (1970), ritual politik dapat mengaktifkan kebijakan kekuasaan politik dan memberikan dasar bagi konflik sosial.

Menurut Edelman (1967) bahwa yang paling menonjol dalam lembaga "demokratis" dan bentuk partisipasi rakyat dalam pemerintahan sebagian besar adalah simbolis dan ekspresif. Salah satu hipotesisnya adalah bahwa kepentingan terorganisir yang kuat akan mendapatkan manfaat material, sedangkan yang tidak terorganisir mendapat jaminan simbolis. Budaya birokrasi telah mendorong untuk melihat masyarakat sebagai objek administrasi, sebagai koleksi yang begitu banyak dari “masalah” yang harus diselesaikan, dikendalikan, dikuasai dan diperbaiki atau dibuat lagi, sebagai

target untuk “rekayasa sosial”, dan secara umum dirancang dan disimpan dalam bentuk yang direncanakan dengan kekerasan.

3. Tahap Sakral

Menurut Day (1984), atribut mitos adalah bahwa mitos dianggap sakral. Menurut Bouchard (2007) tahap ketiga evolusi mitos adalah bahwa mitos menjadi sakral, dimana mitos dipertanyakan karena meningkatnya keraguan terhadap pemerintahan atau politisi. Mitos dana aspirasi masyarakat telah menjadi wilayah “tersembunyi” dari masyarakat. Pembahasan anggaran dilakukan tidak hanya melalui rapat-rapat formal sesuai agenda pembahasan yang dirancang oleh DPRD bersama pemerintah daerah di dalam “rumah rakyat” yang menunjukkan bagaimana “kepentingan yang berbeda” ditunjukkan, tetapi juga melalui rapat-rapat “informal” yang menunjukkan bagaimana “kepentingan yang sama” ditunjukkan untuk bersama-sama “mengamankan” dana aspirasi masyarakat dalam sebuah “*locker*” dimana hanya “penitip” dan yang “dititipi” yang mengetahuinya.

Dana aspirasi masyarakat menjadi sakral dalam wilayah “politik anggaran daerah” dimana “masyarakat” yang melekat pada dana itu telah kehilangan “esensinya”. Ketika wacana *good government governance* terus-menerus mencari tempat melalui konsep akuntabilitas dan transparansi, pada satu sisi dan pada sisi lain dana aspirasi masyarakat “memantapkan” eksistensi sebagai mitos, maka seperti pendapat seorang informan dari masyarakat bahwa “rakyat pasti sangat tidak rela jika “aspirasi” nya dijual demi kepentingan pribadi atau kelompok para wakil rakyat itu sendiri”. Pada titik inilah dana aspirasi masyarakat akan berhadapan dengan masyarakat yang memang “berkepentingan” atas dana tersebut.

4.5 Kebijakan Anggaran Daerah: Fasilitator Narsisisme Ekstrim

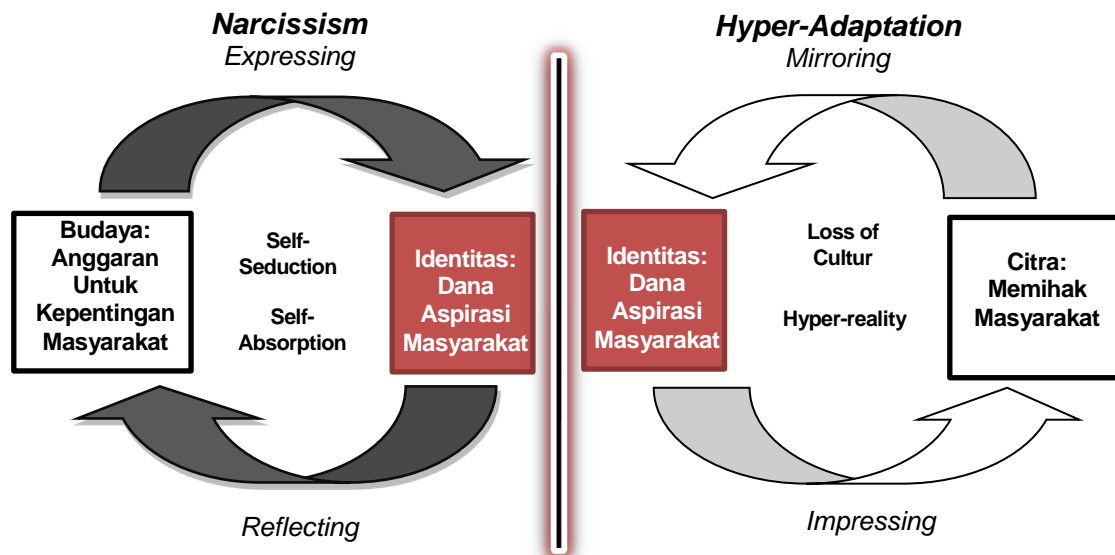
Hasil penelitian ini memberikan pemahaman bahwa kebijakan dana aspirasi masyarakat dalam penganggaran daerah telah menunjukkan bagaimana legislatif menciptakan simbol yang menunjukkan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi dari rakyat yang diwakilinya. Namun, dalam realitasnya, dana aspirasi masyarakat telah menimbulkan kontradiksi sebagai upaya untuk melayani kepentingan mereka. Pada dasarnya anggaran daerah dirancang sebagai

salah satu implementasi dari tugas pemerintah dalam melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu anggaran sesungguhnya didedikasikan untuk kepentingan masyarakat.

Dana aspirasi masyarakat salah satu “penyerapan” dari tindakan aktor anggaran daerah untuk mengekspresikan kepedualian mereka terhadap masyarakat. Dana aspirasi masyarakat menjadi “*expression*” dari kultur anggaran daerah sebagai bentuk “fisis” dari kepentingan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Ketika identitas tersebut menjadi “motif” untuk memperoleh kepentingan “pribadi” atau “kelompok tertentu” atas nama masyarakat, maka dana aspirasi telah digunakan sebagai sarana “*impression*” bahwa mereka “seolah-olah” peduli dengan masyarakat. Dengan demikian dana aspirasi masyarakat bukan lagi realitas sesungguhnya tetapi telah menjadi narsisisme anggaran sebagai bagian dari “cerminan” yang oleh Piliang (2009) sebagai ”politik seduksi” (*politics of seduction*). Dana aspirasi telah menjadi simularka politik anggaran dan telah “terputus” dari akar budayanya (*loss of culture*).

Gambar 2

**Narsisisme dalam Penganggaran Daerah dan
Efek Cermin Dana Aspirasi Masyarakat**



Sumber: Modifikasi dan adaptasi dari Hatch dan Schultz (2002)

Hatch dan Schultz (2002), menemukan bahwa organisasi kehilangan titik acuan dengan budaya organisasi mereka dalam tahap evolusi citra seperti yang dijelaskan oleh Baudrillard (1994), dalam bukunya *Simulacra and Simulation*. Pada tahap pertama, citra mewakili realitas yang sejalan dengan kedalaman makna citra (atau tanda). Pada tahap kedua, citra bertindak sebagai topeng yang menutupi

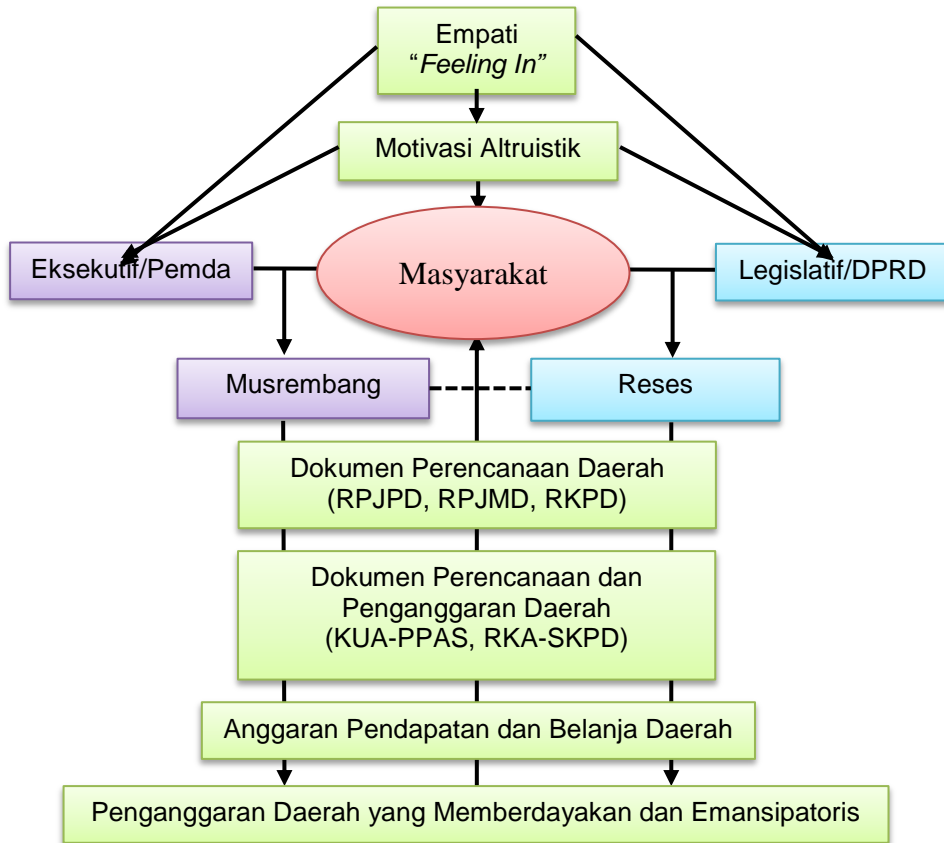
kenyataan yang tersembunyi di bawah permukaan. Pada tahap ketiga, citra tampak sebagai topeng namun realitasnya tidak ada. Akhirnya, pada tahap keempat, citra tidak ada hubungannya sama sekali dengan realitas. Penganggaran daerah telah menimbulkan efek cermin (*mirror effect*) bagi para aktor anggaran yang terlibat di dalamnya. Problematika simbol yang diciptakan oleh aktor penganggaran daerah melalui dana aspirasi masyarakat dan telah membuka ruang untuk menyingkap realitas sesungguhnya dibalik simbol tersebut.

4.6 Konstruksi Model Politik Anggaran Daerah

Penganggaran daerah seharusnya tidak hanya berorientasi sebagai produk “ritual” institusionalis dan teknokratis, yang berupaya membuat anggaran menjadi lebih ekonomis, efisien, akuntabel, perbaikan atau hanya berorientasi pada anggaran yang lebih baik (Wildavsky, 1985), tetapi kehilangan “makna” dan “roh”. Penganggaran daerah juga harus didorong menjadi sebuah hasil konstruksi sosial yang sarat nilai-nilai, bahwa anggaran didedikasikan untuk “kesejahteraan masyarakat” sebagai aspek filosofisnya.

Pada gambar 3, menunjukkan konstruksi model politik anggaran daerah, dimana aspirasi masyarakat menjadi pusat episentrum dalam seluruh rangkaian proses penganggaran daerah dan diperkuat oleh simpul kelembagaan yang bertanggungjawab terhadap perencanaan, penyusunan, penetapan dan pengawasan anggaran daerah. Implikasinya adalah dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yang berisi *core value* (keutamaan nilai) dari seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi landasan “moral dan etika” untuk penyusunan kebijakan penganggaran daerah dan semua kegiatan yang diselenggarakan baik oleh eksekutif maupun legislatif. Mekanisme Musrembang yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan penjaringan aspirasi saat reses oleh DPRD bukan menjadi dua hal yang berbeda, karena sumber inspirasinya sama-sama adalah “masyarakat”. Koordinasi, kerjasama atau kemitraan harus menjadi “*political will*” untuk menyelaraskan hasil penjaringan masyarakat, sehingga semua produk dari dua mekanisme tersebut seluruhnya merupakan “aspirasi masyarakat”.

Gambar 3
Konstruksi Model Politik Anggaran Daerah



Memperjuangkan aspirasi masyarakat harus didasarkan pada motivasi untuk menolong masyarakat sebagai bagian dari perilaku prososial yang memiliki dampak positif terhadap masyarakat luas. Dalam pengertian Batson (1997), sebagai “*motivational state*” yang memiliki kekuatan psikologis untuk mengarahkan tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat. Aktor anggaran yang terlibat dalam proses penjangkaran aspirasi masyarakat harus memiliki empati “*feeling in*” yang dilakukan dengan cara masuk ke dalam kondisi emosional (perasaan) masyarakat melalui pemahaman yang lebih mendalam dan terhadap kondisi masyarakat. *Empathic concern* mampu menghasilkan sensitivitas yang lebih besar terhadap orang lain dalam menghasilkan motivasi altruistik. *Empathic concern* dapat membangkitkan motivasi untuk memberikan pertolongan secara tulus yang hanya berorientasi kepada kesejahteraan, kebaikan, dan kemaslahatan orang lain atau masyarakat luas (Taufik, 2012). Logika representasi

anggota DPRD sebagai wakil rakyat tidak hanya dalam konteks jumlah pemilih dari wilayah daerah pemilihan, tetapi juga menjadi representasi dari kondisi dan keadaan masyarakat yang diwakilinya.

Dengan demikian, penganggaran daerah mestinya dapat diperkaya dan diubah menjadi sebuah konstruksi sosial yang lebih memberdayakan dan emansipatoris jika “cinta” menjadi sentral dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat menjadi suatu kesadaran atau menjadi sesuatu yang benar-benar sangat diperlukan untuk "tindakan yang benar" dan "kehidupan yang lebih baik" dan sebagai sebuah hasil kecakapan manusia yang mendasar dan potensi yang dapat disadari, dibudidayakan dan diperdalam melalui praktik (Molisa, 2011). Harapannya, anggaran daerah dapat kembali berorientasi sepanjang garis yang lebih emansipatoris dan memberdayakan dengan mengedepankan beberapa cara di mana “kesejahteraan masyarakat” menjadi tujuan dasarnya.

5. Simpulan, Implikasi, Dan Refleksi

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, beberapa temuan penelitian ini memberikan pemahaman bahwa;

1. Berdasarkan kajian etno-semiotika, dimana dana aspirasi masyarakat sebagai “tanda” dan menjadi bagian dari kebijakan penganggaran daerah diamati dalam dimensi sosialnya, maka digunakan dua tingkat analisis yaitu analisis mikro, menyangkut pengalaman langsung dalam kehidupan sehari-hari para informan berhadapan tanda, dan analisis tingkat makro yang terkait dengan konteks relasi sosiopolitik dan institusi dibalik teks, terkait dengan hal ini, temuan penelitian ini memberikan pemahaman.

- 1) Dana aspirasi masyarakat sebagai penanda, dalam sudut pandang legislatif atau anggota DPRD sebagai sarana atau upaya untuk mengimplementasikan fungsi legislatif dalam menyalurkan aspirasi masyarakat yang diperoleh pada saat melakukan tugas reses. Pada tingkat petanda, mereka menempatkan dana aspirasi masyarakat dalam anggaran daerah sebagai sarana untuk melayani kepentingan masyarakat “konstituen”, dan menjadi salah satu pertimbangan untuk melakukan pemerataan antara daerah pemilihan.

- 2) Pada tingkat mikro, dana aspirasi masyarakat beroperasi pada wilayah konotasi sebagai tanda yang berkaitan dengan kode nilai, makna sosial serta berbagai perasaan, sikap atau emosi yang dikesankan oleh informan. Perangkat pemerintah daerah yang menjadi “objek” dana aspirasi masyarakat memaknai dana aspirasi masyarakat tidak lebih sebagai dana “titipan” pada program kerja dan anggaran SKPD sebagai “*locker*” yang sulit dikelola karena sebagian dana tersebut telah dialokasikan kepada anggota DPRD sebagai “penitip” dana aspirasi. Dana aspirasi masyarakat dimaknai sebagai sebagai “*pork barrel*”, politik citra, sebagai *stomach gas* (prakteknya ada, sulit dibuktikan), konspirasi kepentingan, dana inspirasi, dan sebagai “*mustche shear effect*” yang dianggap tidak memberikan dampak yang luas bagi masyarakat. Dengan demikian program dan kegiatan yang menjadi “muatan” dana aspirasi masyarakat sulit diharapkan untuk memberikan manfaat mendasar sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini juga disebabkan karena dana yang diserap oleh program sangat tidak efektif karena sebagian besar telah “dialokasikan (“dibagi-bagi”)” kepada aktor yang terlibat dalam penganggaran daerah. Tingginya tingkat penyagunaan anggaran daerah menunjukkan bahwa anggran daerah khususnya dana aspirasi masyarakat tidak berdaya dalam lingkaran politik dan kekuasaan.
- 3) Pada tingkat makro, penelitian ini memperoleh pemahaman bahwa dana aspirasi masyarakat sebagai mitos yang sebetulnya arbiter dan konotatif, berdasarkan pengembangan yang dilakukan oleh informan dalam penelitian ini dan pemahaman yang mendalam terhadap adanya kecenderungan narsisisme dalam penganggaran daerah. Mitos dana aspirasi masyarakat menjadi wilayah “tersembunyi” dari masyarakat. Dana aspirasi masyarakat sebagai mitos, dapat diamati pada bagaimana dana aspirasi masyarakat berevolusi sebagai mitos. Dana aspirasi masyarakat telah berdifusi sebagai narasi yang diciptakan untuk sebuah kepentingan “*budgeting narcissism*”, menjadi ritual dalam penganggaran daerah dan akhirnya menjadi “sakral”, karena mulainya muncul gerakan-gerakan sosial yang menyangsikan kebijakan dana aspirasi masyarakat sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

2. Narsisisme dalam penganggaran daerah dapat diamati melalui penelusuran pada tanda “dana aspirasi masyarakat” yang diciptakan oleh aktor penganggaran daerah dan sebagai bentuk dinamika penganggaran daerah dalam membentuk identitas yang melekat pada anggota DPRD sebagai wakil rakyat atau birokrat sebagai pelayanan masyarakat. Dana aspirasi masyarakat menjadi “*expression*” dari kultur anggaran daerah sebagai bentuk “fisis” dari kepentingan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga memperoleh pemahaman bahwa, ketika identitas tersebut menjadi “motif” untuk memperoleh kepentingan “pribadi” atau “kelompok tertentu” atas nama masyarakat, maka dana aspirasi telah digunakan sebagai sarana “*impression*” bahwa mereka “seolah-olah” peduli dengan masyarakat. Dengan demikian dana aspirasi masyarakat bukan lagi realitas sesungguhnya tetapi telah menjadi narsisisme anggaran sebagai bagian dari “cerminan” yang oleh Piliang (2009) sebagai “politik seduksi” (*politics of seduction*). Dana aspirasi telah menjadi simularka politik anggaran dan telah “terputus” dari akar budayanya (*loss of culture*). Sebagai salah satu jalan keluar, penelitian ini mencoba untuk mengusulkan model politik anggaran daerah yang lebih memberdayakan dan emansipatoris, dimana, “kita” yaitu “masyarakat” menjadi pusat episentrum dari seluruh proses penganggaran daerah. Dana aspirasi masyarakat bukan hanya menjadi bentuk “simpati” tetapi menjadi bentuk “empati” dari para aktor anggaran untuk menjalankan “amanah” sebagai wakil dan pelayan masyarakat. Motivasi yang lebih bersifat egoistik “narsisisme” harus didorong pada pencapaian *empathic concern* yang merupakan respon dari motivasi altruistik.

5.2 Implikasi Penelitian

1. Implikasi Praktis

Pada tataran praktis mekanisme dana aspirasi yang sebelumnya dimaksudkan sebagai alokasi dana bagi anggota DPR/D sesuai daerah pemilihan (dapil) dan ternyata telah menjadi budaya penganggaran daerah yang justru cenderung manipulatif. Sebagai implikasinya, maka bentuk-bentuk pencitraan melalui usulan atau wacana alokasi dana atas nama masyarakat harus dihentikan. Implikasi praktisnya adalah dana aspirasi masyarakat bukan hanya menjadi hasil usulan anggota dewan, tetapi bahwa seluruh program kerja dan anggaran dalam anggaran daerah adalah merupakan aspirasi

masyarakat. Legislatif harus berani mengevaluasinya dan justru fokus pada mekanisme pengawasan, agar dana aspirasi masyarakat benar-benar tepat sasaran. Para birokrat, dalam hal ini SKPD sebagai objek titipan dana aspirasi harus berani menolak setiap usulan yang tidak sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Akhirnya, masyarakat harus ditempatkan sebagai objek dan subjek dari seluruh mekanisme penganggaran daerah.

Sebagai implikasi kebijakan, pertama. dana aspirasi menjadi bagian totalitas dari desain (*by design*) seluruh proses penganggaran daerah. Praktek selama ini, menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan dana aspirasi masyarakat sangat rendah, karena jumlah dana alokasi dana aspirasi tidak diketahui dan hanya menjadi bagian dari “negosiasi” antara pemerintah daerah dan DPRD melalui masing-masing perangkat dan alat kelengkapan mereka. Kedua, idealnya mekanisme Musrebang dan reses mempunyai tujuan dan sasaran yang sama yang dilaksanakan oleh dua lembaga. Untuk itu mestinya kedua mekanisme ini diakselerasikan, sehingga tidak muncul dikotomi tentang siapa itu masyarakat dan apa kebutuhannya yang harus di akomodasi dalam penganggaran daerah.

3. Implikasi Teoretis

Implikasi teoretis dari penelitian ini menunjukkan bahwa penganggaran daerah terlepas dari ukuran, kompleksitas, dan sektoral sangat bergantung pada sistem anggaran dalam mencapai tujuan strategis. Meskipun mekanisme teknis penyusunan anggaran tidak diabaikan sama sekali, akan tetapi tampaknya semakin nyata bahwa proses penyusunan anggaran tidak hanya diamati dalam konteks perilaku (*behavioral*), tetapi dapat dikembangkan dalam perspektif yang lebih luas, untuk mengamati dampak psikologi, sosial dan tentu politis.

Implikasi lain dari penelitian ini pada tataran teoretis diberikan dari aspek pendekatan penelitian. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan interpretif yang dikembangkan ke pendekatan kritis. Dengan pendekatan ini, diharapkan akan terbangun bentuk proposisi-proposisi kritis sebagai hasil penelitian empiris yang berpijak pada disiplin apa pun yang dipandang dapat digunakan sebagai refleksi kritis praktik akuntansi sektor publik. Penggunaan analisis etno-semiotika khususnya, dapat memperluas kajian

untuk mengamati berbagai aspek nilai dalam konteks sosiopolitik dan institusi dibalik teks yang diproduksi dalam penganggaran daerah.

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Agenda Penelitian ke Depan

Keterbatasan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini hanya memilih dana aspirasi masyarakat sebagai salah satu realitas dalam penganggaran daerah. Dana aspirasi masyarakat dalam penelitian ini dipilih sebagai salah satu elemen tanda yang melampaui (*hyper-signifier*) yang dimaknai terkait dengan kecenderungan narsisisme dalam penganggaran daerah. Dengan pendekatan semiotika dapat menggunakan seluruh teks atau tanda yang diciptakan atau diproduksi dalam penganggaran daerah.

Penelitian ini mungkin tidak dapat memberikan pembahasan yang tuntas, berhubung beragamnya dan kompleksnya penganggaran daerah dalam berbagai sudut pandang. Namun, bagi paradigma kritis, hal ini dapat menjadi salah satu bentuk dialektika pengetahuan (akuntansi anggaran), bahkan untuk melakukan perubahan. Perubahan dan pergerakan selalu melibatkan kontradiksi dan bahkan hanya dapat terjadi melalui kontradiksi tersebut. Semoga penelitian ini dapat memberikan inspirasi dan kesempatan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan tujuan untuk melengkapi, mempertegas atau menolak pemahaman yang diperoleh dari penelitian ini.

Oleh karena itu, agenda penelitian ke depan (dalam kerangka paradigma yang sama dengan penelitian ini), dapat dikembangkan, pertama, melalui berbagai tanda yang diproduksi dalam penganggaran daerah. Dengan asumsi bahwa, jika proses penganggaran adalah merupakan konstruksi sosial maka apapun yang ada dalam anggaran merupakan tanda atau teks yang dapat dikaji melalui studi semiotika. Laporan keuangan daerah, laporan pertanggungjawaban kepala daerah, tanda-tanda seperti bantuan sosial, hibah masyarakat miskin, pendidikan gratis, kesehatan gratis merupakan wilayah-wilayah “seksi” yang dapat menjadi lokus kajian pada masa yang akan datang.

Kedua, penelitian ini didasarkan pada semiotika Barthes, sehingga penelitian ke depan dapat melihat dan mengkaji praktik akuntansi anggaran daerah dengan menggunakan "kacamata" filsafat dari para filsuf yang berbeda. Misalnya, kajian semiotika berdasarkan filsafat strukturalisme (modernisme) di bawah nama-nama besar seperti Ferdinand de Saussure, Charles S. Peirce, Julia Kristeva, Althusser, Noam Chomsky, Roman Jakobson, Levi-Strauss atau lainnya. Kajian seperti ini juga dapat dikaji

berdasarkan filsafat pos-strukturalisme (posmodernisme) di bawah nama-nama besar seperti Derrida, Jurgen Habermas, Paul Ricouer, Martin Heidegger, Michel Foucault, Jean Baudrillard, Jean Francois Lyotard, Jacques Lacan, dan lainnya. Dengan agenda penelitian demikian, praktik akuntansi di masa depan diharapkan akan semakin bermakna.

Daftar Pustaka

- Barthes, Roland. 1981. "Theory of The Text" dalam *Untying The Text: A Post-Structuralist Reader* by Robert Young (Ed). Boston, London and Henley: Routledge & Kegan Paul.
- Barthes, Roland. 1995 (1957). "Myth Today." *Mythologies*. Tr. Annette Lavers. New York: Hill and Wang, 109-159.
- Batson, C.D. 1997. Self-Other Merging and The Empathy-Altruism Hypotesis: *Reply to Neuberg et.al. Journal Personality and Social Psychology*.
- Baudrillard, J. 1994. *Simulacra and Simulation* (trans. S.F. Glaser). Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Bauman, Z. 1989. *Modernity and the Holocaust*. Cambridge: Polity.
- Baumeiser, R. 1999. *The Self in Social Psychology*. London: Psychology Press.
- Bell, D. 2008. Agonistic Democracy and the Politics of Memory. *Constellations*, Vol. 15, No. 1, pp. 148-66
- Bouchard, G. 2007. Le Mythe: Essai de definition'. In Bouchard, G. and Andres, B. (eds) *Mythes et societes des Ameriques (Montreal: Quebec Amerique)*. Campbell, J. (2002) *The Inner Reaches of Outer Space: Metaphor as Myth and as Religion (New York: New World Library)*.
- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Social*, Jakarta : Kencana Prenama Media Group
- Campbell, W.K., Keith Goodie S. Adam, dan Foster D. Joshua. 2004 Narcissism, Confidence, and Risk Attitude. *Journal of Behavioral Decision Making*, 17: 297-311.
- Chatterjee, A. dan Hambrick, D.C. 2006. It's All About Me: Narcissistic Chief Executive officers and Their Effects on Company Strategy and Performance, *Administrative Science Quarterly* 52, 351-386.
- Culler, Jonathan. 1981. *The Pursuit of Signs: Semiotics, Literature, Deconstruction*. London and Henley: Routledge & Kegan Paul.
- Deetz, S.A. 1982. Critical Interpretive Research in Organizational Communication. *Western Journal of Speech Communication*, 46,131-149.
- Dunbar, R. 1985. Narcissistic Dilemmas and Studies of Organizations. Paper presented at *The Conference on Alternative Perspectives on Organizations*, Baruch College, New York.
- Edelman, M. 1967. *The Symbolic Uses of Politics*, Urbana, Univ. of Illinois Press (paperback).
- Fossey E, Harvey, C., McDermott, F., Davidson, L. 2002. Understanding and Evaluating Qualitative Research. *Aust N Z J Psychiatry* 36(6): 717-32
- Gupta, A.K., and Govindarajan, V. 1984. Business Unit Strategy, Managerial Characteristics and Business Unit Effectiveness at Strategy Implementation. *Academy of Management Journal*, 27, 25-41.
- Hatch, M. J. dan Schultz, M. 2002. Organizational Identity Dynamics. *Human Relations*, 55, 989-1018.
- Hermawan, A. 2008. *Mitos dan Bahasa Media: Mengenal Semiotika Roland Barthes*. <http://www.averroes.or.id>
- Johansson, N. 2012. *In Memory of Narcissus: Aspects of the Late-Modern Subject in the Narcissus Theme 1890-1930. Litteraturvetenskapliga institutionen Uppsala universitet*
- John, O.P. dan Robins, R. W. 1994. Accuracy and Bias in Self-Perception: Individual Differences in Self-Enhancement and The Role of Narcissism. *Journal of Personality and Social Psychology*, 66, 206-219.
- Kernberg, O. 1975. *Borderline Conditions and Pathological Narcissism*. New York: Jason Aronson.

- Kets de Vries, M.F.R. 2004. Organizations on the Couch: A Clinical Perspective on Organizational Dynamics. *European Management Journal* Vol. 22, No. 2, pp. 183–200.
- Kets de Vries, M.F.R. dan Miller, D. 1985. Narcissism and Leadership - an Object Relations Perspective. *Human Relations* 38 (6):583-601.
- King, R.F. 2000. *Budgeting Entitlements: The politics of food stamps*. Georgetown University Press. Washington DC.
- Koselleck, R. 1985. *Futures Past; on The Semantics of Historical Time*. Cambridge and London: The MIT Press.
- Koven, S.G. 1999. *Public budgeting in the United States: The Cultural and Ideological Settings*. Georgetown University Press, Washington DC.
- Lasch, C. 1979. *The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations*. New York: W. W. Norton.
- Lutus, Paul, 2007. Social Narcissism, The Variety and Persistence of Human Self-Deception <http://www.arachnoid.com/opi>
- Miller, D. dan Droge, C. 1986. Psychological and Traditional Determinants of Structure, *Administrative Science Quarterly*, Vol. 31, pp. 539-560.
- Miller, D., Kets de Vries, M.F.R., dan Toulouse, J. 1982. Top Executive Locus of Control and Its Relationship to Strategy-making, Structure and Environment, *Academy of Management Journal*, Vol. 25, pp. 237-253.
- Molisa, Pala. Love and Accounting. School of Accounting and Commercial Law Victoria University of Wellington Wellington New Zealand <http://elsevier.conference-services.net/resources/247/2182/pdf>
- Myers, D.G., 2000. The funds, friends, and faith of happy people. *Am. Psychol.* 55, 56–67.
- Norton, Andy dan Diane Elson. 2002. What's behind the budget? Politics, rights and accountability in the budget process. Centre for Aid and Public Expenditure Overseas Development Institute, London
- Paulhus, D.L. dan Williams, K.M. 2002. The Dark Triad of Personality: Narcissism, Machiavellianism, and Psychopathy. *Journal of Research in Personality*, 36, 556–563.
- Pech, R.J. dan Slade, B.W. 2007. Organisational Sociopaths: Rarely Challenged, Often Promoted. Why?. *Society and Business Review* 2(3), 254–269.
- Piliang, Y. A. 2009. Simulakra Politik (online), <http://taitaiberacun.wordpress.com/2009/06/05/narsisme-politik/>
- Piliang, Y.A. 2003. *Hipersemiotika: Tafsir Cultural Studies Atas Matinya Makna*. Bandung: Jalasutra.
- Piliang, Y.A. 2012. *Semiotika dan Hipersemiotika: Kode, Gaya dan Matinya Makna*. Edisi 4. Penerbit Matahari, Bandung.
- Rachman, A. 2009. [Demokrasi, Narsisme dan Keaksaraan Budaya](#). Makalah pada *Workshop Penguatan Kapasitas Gerakan Antariman*, diselenggarakan di Manado, Sulawesi Utara, 22-27 Juni 2009.
- Raskin, R., Novacek, J. dan Hogan, R. 1991. Narcissism, Self-Esteem, and Defensive Selfenhancement. *Journal of Personality*, 59, 20-38.
- Sala, Vincent Della. 2010. *Political Myth, Mythology and the European Union*. **JCMS Volume 48. Number 1. pp. 1-19**
- Sarantakos, S. 1993. *Social Research*. MacMillan: London.
- Syarifuddin, 2009. Konstruksi Kebijakan Anggaran: Aksentuasi Drama Politik dan Kekuasaan (Studi Kasus Kabupaten Jembrana Bali). *Jurnal Ekuitas* Vol.5 No.2. 307-331
- Taufik. 2012. *Empati: Pendekatan Psikologi Sosial*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wildavsky, Aaron B. 2001. *Budgeting and Governing*. (Edited with a Postscript by Brendon Sweldow and an Introduction by Joseph White). New Brunswick, NJ: Transaction.
- Wildavsky, Aaron. 1988. *The New Politics of the Budgetary Process*. Glenview, IL: Scott, Foresman.
- Zaleznik, Abraham, and Manfred F.R. Kets de Vries (1975/1985) *Power and the Corporate Mind*, Boston: Houghton-Mifflin; new ed, Chicago: Bonus Books, 1985. *Translated into Portuguese as O Poder e a Mente Empresarial, Sao Paulo: Livraria Pioneira Ediotra, 1981.*